



BAB I

PENDAHULUAN

KURANGNYA UPAYA PENGKEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. OKU SELATAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat signifikan dan efektif untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan devisa negara.

Perkembangan kebutuhan manusia akan pariwisata menyebabkan sektor ini memiliki prospek perkembangan yang besar di masa depan, karena bukan hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, tapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan memperkenalkan budaya serta kearifan lokal dan keindahan alam suatu daerah.

Sebagai salah satu 'promising sector' yang secara simultan akan mempermudah perputaran barang dan jasa di suatu daerah, maka sektor pariwisata harus dipersiapkan secara terintegrasi oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Provinsi Sumatera Selatan.

Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, kabupaten ini juga memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola sumber daya yang ada, terutama potensi pariwisata.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki potensi pariwisata berupa keindahan alam dan keragamam budaya untuk dikembangkan, dikenalkan serta dinikmati oleh masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.

Beberapa potensi tersebut antara lain pantai, air terjun, perbukitan atau dataran tinggi sampai pada keunikan seni budaya yang melekat pada masyarakat Kab Ogan Komering Ulu Selatan, seperti kampung adat serta upacara adat.

Salah satu tujuan wisata yang sudah cukup dikenal, baik nasional maupun internasional adalah Kampung Adat Semendo, Daya, Kisam, Ranau, Haji, Komering serta pantainya yang indah dan pesona Danau Ranau.

Kampung Adat dan pantai ini terletak di Ogan Komering Ulu Selatan, tetapi selain dari Kampung Adat dan Pantai Bidadari ini, pesisir pantai danau ranau juga masih memiliki potensi pariwisata, baik potensi alam maupun budayanya yang perlu diintegrasikan dalam rencana



pengembangan pariwisata di Ogan Komering Ulu Selatan, dengan daya tarik utama kampung Adat dan pesona danau ranau dan pantai bidadari.

Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKU Selatan telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Para peneliti dan seluruh tenaga pendukung yang terlibat dalam kegiatan kajian ini tentunya sudah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan dalam bentuk makalah kebijakan (paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis.

laporan dalam bentuk makalah kebijakan (paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengerahkan kemampuan dan komitmentnya.

Disadari bahwa meskipun semua upaya sudah dilakukan untuk kesempurnaan makalah kebijakan ini, tentu masih ada kekurangan-kekurangannya dan saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk peyempurnaannya.

Terima kasih juga disampaikan kepada BAPPERIDA Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan untuk kerjasama dan dukungannya.

Diharapkan kerjasama ini bukan yang terakhir dan masih dapat dilanjutkan untuk masa yang akan datang.

Terakhir, diharapkan bahwa hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan akan dapat dimanfaatkan dalam implementasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas, khususnya di Ogan Komering Ulu Selatan dan juga secara umum dapat menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten OKU Selatan.

Kabupaten OKUS Selatan merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003.



Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004 di Muara Dua, ibu kota kabupaten OKU Selatan. Secara geografis, Kab. OKU Selatan terletak di bagian barat daya ujung selatan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

Topografi wilayah Kab. OKU Selatan sebagian besar merupakan dataran tinggi yang membentuk bukit-bukit dan gunung-gunung.

Sedangkan untuk peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan, yaitu ;

1. Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat.
3. Menciptakan kondisi investasi yang kondusif yang dapat membantu perekonomian rakyat.
4. Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1). Lebih lanjut, Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan tahun 2023. Dokumen perencanaan yang bersifat “indikatif” menjadi pedoman atau landasan dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penganggaran daerah, dalam Bersifat “indikatif” mengandung makna bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang terkandung di dalam dokumen ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kepariwisata dimasa datang.

Sejauh ini, perkembangan dalam urusan promosi kepariwisataan semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari, makin maraknya promosi tentang kawasan Pariwisata ataupun liputan event-event melalui media cetak maupun elektronik.



Hal tersebut mampu menciptakan peluang untuk meningkatkan devisa di tahun-tahun yang mendatang.

Permasalahan Kurangnya optimal upaya perkembangan pembangunan kepariwisataan. Adapun beberapa permasalahan krusial di bidang Pariwisata ataupun yang mempengaruhi kepariwisataan dan harus segera mendapatkan perhatian dari semua pihak adalah seperti di bawah ini.

Dalam hal pembangunan fisik dan infrastruktur akan tetapi juga dalam hal pembangunan SDM Pariwisata lokal. Hal ini tentu saja harus mendapat perhatian Khusus dari pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota.

Meningkatnya kualitas destinasi haruslah dilakukan sebagai usaha menyeluruh bagi semua elemen produk wisata, dari transportasi, hotel, restoran, objek wisata, dan tentu juga pelayanan yang baik kepada wisatawan.

Kalau wisatawan merasa takut melakukan perjalanan ke Kab OKU Selatan terutama pada kawasan wisata Danau Ranau dengan alasan keselamatan wisatawan tidak terjamin, artinya kita harus meningkatkan kualitas keamanan yang ada.

Kalau sepi wisatawan ini merupakan efek domino dari persoalan yang lain karena wisatawan datang ke Kab OKU Selatan tidak hanya untuk tinggal di hotel saja.

Bagaimana wisatawan mau datang ke Kab OKU Selatan jika objek wisata dan komponen lainnya tidak sesuai dengan harapan wisatawan.

aman kota yang tidak terawat dan langkanya ruang hijau terbuka juga memperburuk kesan kota ditambah kemacetan terutama di daerah pariwisata dan maraknya aksi premanisme yang juga harus mendapatkan perhatian serius dari pihak yang terkait.

Permasalahan Kelembagaan Pariwisata Masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM lokal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab OKU Selatan baik di bidang skill dan kemampuan serta wawasan kepariwisataan.

Pada kenyataannya sumber daya manusia pariwisata Kab OKU Selatan khususnya orang-orang OKU Selatan belum memiliki kualifikasi yang berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Oku Selatan.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan



Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Identifikasi Permasalahan

Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan, yaitu sikap masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah, Kenangan).

Pembangunan infrastruktur pada sebuah destinasi wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata di semua destinasi wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, alte, jembatan dan lain sebagainya.

Kesiapan destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan pada daerah tujuan wisata memerlukan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dengan penyesuaian lokasi serta kondisi destinasi wisata yang bersangkutan (Herman, 2017).

Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan kawasan wisata dan juga keramah tamah belum dijumpai.

Selain dari faktor masyarakatnya itu sendiri, tantangan yang dihadapi yaitu dari fasilitas dalam urusan Kebudayaan ataupun Pariwisata yang belum mendukung pengembangan urusan ini.

Sedangkan untuk peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan, yaitu ;

1. Daerah Kawasan Wisata di Kabupaten OKU Selatan, yaitu Kawasan Wisata Danau Ranau memiliki wisata yang kompleks / lengkap, di antaranya wisata air, wisata alam, wisata kuliner



dan juga ditunjang oleh pemandangan yang sangat alami, sehingga dengan adanya kawasan wisata seperti ini mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar untuk berkunjung ke Kabupaten OKU Selatan.

2. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupa OKU Selatan, akan mampu meningkatkan devisa negara.

Rumusan Masalah (Problem Statement)

Rumusan disusun untuk memberikan kerangka Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Analisis Isu Strategis Daerah Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan stakeholder kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dalam perkembangan kepariwisataan diKab OKU Selatan.

Permasalahan dimaksud, terdiri dari Permasalahan pembangunan mengenai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Keadaan dan perkembangan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Permasalahan umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) adalah :

- a. **Terbatasnya infrastruktur akses jalan (Sakip 2023)**
- b. Rendahnya Kemampuan Pelaku Usaha dan Media masa.
- c. Masih Terbatasnya Tingkat Pemasaran dan data Kepariwisataa



Penyebab Masalah: I

- 1.a Masih kurang pembangunan sarana jalan menuju tempat2 wisata
- 1.b Masih kurang nya kerjasama dengan dinas2 PU/ yang membuat perencanaan pembangunan jalan untuk menuju tempat objek wisata

Penyebab Masalah : II

- 1.a.1 Masih terbatasnya Anggaran/ kurang anggaran
- 1.a.2 Masyarakat Kurang mendukung dalam pelebaran jalan
- 1.a.3 Masih kurangnya pemanfaatan potensi pariwisata daerah
- 1.b.1 Pemilihan Prioritas pembangunan jalan dari dinas PU yang bukan ditujukan ke destinasi wisata
- 1.b.2 Usulan Disbudpar Ditolak Oleh Dinas PU, Karena Kurang memberikan Justifikasi dan alasan yang kuat
- 1.b.3 Lembaga pembangunan infrastruktur yang kurang kompeten

Akar Masalah :

Terbatasnya infrastruktur akses jalan merupakan masalah utama dalam isu kurang optimalnya upaya pengembangan pariwisata. Masalah utama tersebut disebabkan kurangnya anggaran & kerjasama dengan dinas terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan.



BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

2.1 Analisis Dan Pembahasan Masalah

Pada bab ini saya akan membicarakan pembahasan masalah pada bab I.

Pemerintah berperan dalam menghadapi permasalahan pariwisata di antaranya :

1. Meningkatkan infrastruktur

Pemerintah dapat Meningkatkan infrastruktur pariwisata, seperti menyediakan fasilitas dan memperluas berbagai bentuk layanan.

Infrastruktur pariwisata adalah sumber daya alam dan buatan manusia yang dibutuhkan wisatawan saat berwisata seperti :

- Jalan raya, bandara, dan pelabuhan.
- Hotel, Resort dan fasilitas akomodasi lainnya
- Taman tema, waterpark/ pusat seni dan budaya.

Pembangunan infrastruktur pariwisata dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas akomodasi dan vasilitas, rekreasi dan hiburan.

Pembangunan infrastruktur pariwisata juga dapat meningkatkan keberlanjutan pariwisata, menarik investasi untuk pembangunan, meningkatkan geliat perekonomian di wilayah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten ogan komering ulu selatan.

2. Melakukan Promosi

Pemerintah dapat malakukan promosi pariwisata yang efektif di dalam maupun di luar negeri.

3. Memberikan Pelatihan

Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada palaku usaha pariwisata seperti pelatihan manajemen home stay, tata kelola destinasi pariwisata, dan pemandu wisata selam.

4. Menfasilitasi

Pemerintah dapat menfasilitasi dan mendorong penanaman modal dalam pengembangan pariwisata.

5. Mengalokasikan anggaran

Pemerintahan dapat mengalokasikan anggran untuk potensi pariwisata.



2.2 Pengertian Kebijakan Atau Landasan Teori.

Kebijakan (policy paper) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan merupakan hasil dari antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik.

Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.

Menurut Bridgman dan Davis (Suharto, 2013:3) bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai „whatever government choose to do or not to do.“ Artinya, kebijakan publik adalah „apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.“ Kadang-kadang kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesejahteraan.

Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitasi sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijakan publik. Menurut Bridgeman dan Davis (Suharto, 2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

Menurut Dye (Suharto, 2013:44) definisi kebijakan publik secara luas yakni sebagai “whatever governments choose to do or not to do”. Menurut Richard Rose (Winarno, 2014:20) bahwasanya kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.



William N. Dunn (2003:109) kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan didalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan.

2.3 Teori Kepariwisata.

a. Penjelasan Teori Kepariwisata adalah :

Teori pariwisata menurut Salah Wahab, "Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sector produksi lain di dalam negara penerima wisatawan." (Wahab, 2003: 5).

Pariwisata merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekonomi karena mendorong perkembangan sektor ekonomi nasional, diantaranya menggugah industri baru berkaitan dengan jasa wisata, misal: usaha transportasi, akomodasi (hotel, pondok wisata), memperluas pasar barang-barang lokal pariwisata, memperluas lapangan kerja baru (hotel atau tempat penginapan lainnya, usaha perjalanan, kantor-kantor pemerintah yang mengurus pariwisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cenderamata, serta tempat-tempat penjualan lainnya), serta membantu pembangunan daerah-daerah terpencil jika daerah itu memiliki daya tarik pariwisata. (Wahab, 2003: 9).

Dapat diartikan bahwa pariwisata dapat menunjang perekonomian obyek wisata yang dituju oleh para wisatawan. Dalam penelitian kali ini adalah pariwisata dapat mengembangkan potensi yang ada pada desa-desa wisata, misal: potensi kerajinan, pertanian, budaya, agro dan pemandangan alam yang terdapat di masing-masing kota wisata.

Sehingga dengan berkunjungnya wisatawan ke desa-desa wisata, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Selain mengembangkan potensi desa wisata, pariwisata dapat menghidupkan industri jasa wisata, dalam hal ini transportasi yang ada di desa wisata, penginapan, serta kerajinan tangan yang dikembangkan di suatu desa wisata.

Pariwisata juga membantu pembangunan daerah desa wisata tersebut agar semakin berkembang dan dapat meningkatkan potensi wisatanya.



Bukan hanya itu saja, pariwisata juga dapat menjadikan lahan lapangan kerja baru, misal: kantor pariwisata, penerjemah (guide), industri kerajinan, tempat penjualan cenderamata, dan lain sebagainya.

Wisatawan (tourist) adalah pengunjung yang menetap sekurang – kurangnya 24 jam di suatu negara dan maksud mereka berkunjung dapat didasarkan atas:

- a. Waktu luang (berekreasi, cuti, untuk kesehatan, studi agama, dan olahraga).
- b. Bisnis, keluarga, misi, rapat dinas (Wahab, 2003: 40).

b. Penjelasan Konsep Kepariwisata

Konsep waktu luang disini diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan jelas, yakni untuk mencari kepuasan atau melakukan relaksasi melalui perjalanan. (Susanto, 1995: 134), Sehingga waktu luang yang dihabiskan wisatawan bukan berarti tanpa tujuan yang jelas, tetapi wisata dimaksudkan untuk berhenti sejenak dari aktifitas sehari-hari dan mencari kesenangan melalui kegiatan berwisata.

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud wisatawan adalah pengunjung yang menginap di homestay-homestay yang telah disediakan di desa wisata.

Sedangkan wisatawan nusantara adalah wisatawan dalam negeri. Wisatawan nusantara sama artinya dengan wisatawan domestik.

Singkatnya, sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat dapat memberikan dampak jangka panjang. Baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung.

c. Hubungan Pemerintahan

Dengan demikian pemerintah Kabupaten OKU Selatan atau Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten OKU Selatan Sedang berupaya untuk membuka peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, yaitu ;

1. Daerah Kawasan Wisata di Kabupaten OKU Selatan, yaitu Kawasan Wisata Danau Ranau memiliki wisata yang kompleks / lengkap, di antaranya wisata air, wisata alam, wisata kuliner dan juga ditunjang oleh pemandangan yang sangat alami, sehingga dengan adanya kawasan wisata seperti ini mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar untuk berkunjung ke Kabupaten OKU Selatan.



2. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten OKU Selatan, akan mampu meningkatkan devisa negara.

Sejauh ini, perkembangan dalam urusan promosi kepariwisataan semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari, makin maraknya promosi tentang kawasan Pariwisata ataupun liputan event-event melalui media cetak maupun elektronik. Hal tersebut mampu menciptakan peluang untuk meningkatkan devisa di tahun-tahun yang mendatang.

- UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Setelah otonomi daerah digulirkan, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu dikembangkan dengan lebih baik dan benar.



BAB III

PILIHAN KEBIJAKAN

Pilihan Kebijakan

Memahami kelebihan dari program kepariwisataan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan relevansinya serupa dengan fakta empiris yang ada dengan mempertimbangkan karakteristik fokus nilai dan dualitas nilai (William Dunn 1999) menjelaskan bahwa karakteristik fokus nilai adalah upaya untuk menentukan manfaat sosial dari kebijakan dan program. Sedangkan dualitas nilai berfokus pada tuntutan evaluasi multifungsi yang di pandang sebagai tujuan dan cara yang merefleksikan kepentingan objektif implikasi tujuan dan sasaran hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan peraturan undang-undang No.32 Tahun 2024 tentang otonomi daerah secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten memiliki otoritas untuk mengurus dan berbagai sektor pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya tentang Destinasi Wisata telah terdapat tujuan serta sasaran yang telah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut : tujuan sasaran program Kota Wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

- Pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah peningkatan jumlah wisatawan domestik dan luar negeri meningkatkan kerjasama masyarakat dalam sektor dalam sektor pemberdayaan pengusaha pariwisata.

Selanjutnya dengan menganalisa hasil penelitian ini dengan tiori evaluasi kebijakan publik karya (William Dunn 1999). Pada kajian dualitas nilai dan interdependensi faktor dan nilai telah ditemukan fakta empiris atas kinerja kebijakan yang optimal di lapangan yang relevansinya sebagai berikut :

- Meningkatkan insfrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata pembangunan jalan, hotel, bandara dan pelabuhan/ dermaga.

Tugas lain dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu sebagai penanggungjawab atau leading sector dari seluruh program kerja pokdarwis sebagai wakil dari implementor program kota wisata.

Kebijakan (*policy*) ialah salah satu topik pembahasan yang sangatlah unik. Dimana kebijakan manusia (Dunn, 2004). Kepariwisata memiliki fungsi yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Hubungan antara



kepariwisataan dan bidang-bidang kehidupan di luar kepariwisataan, perlu dikaji agar terjadi sinergi antara sistem internal kepariwisataan dan faktor eksternal tersebut. Dengan melakukan kajian terhadap keadaan maupun permasalahan mengenai bidang-bidang kehidupan lain di luar kepariwisataan, beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sistem kepariwisataan akan muncul ke permukaan. (Hasnadi, 2019).

Tantangan masa depan bagi sistem kepariwisataan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkan kepariwisataan secara internal, tetapi juga bagaimana Meningkatkan kesesuaian kepariwisataan dengan bidang-bidang kehidupan lain.menguasai teknik-teknik pengembangan, tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu kepariwisataan yang relevan, baik isu kepariwisataan secara internal maupun isu-isu kepariwisataan dalam kaitannya secara lintas sektoral. Isu-isu kepariwisataan secara internal meliputi sistem kepariwisataan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti isu pemerataan dan perluasan akses kepariwisataan, isu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing kepariwisataan, serta isu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraaan publik (Aslamiyah dkk,2014).

Isu kepariwisataan secara eksternal juga penting untuk terus dikaji oleh para analis kebijakan,menyangkut keterkaitan yang intergral antara pdan kepariwisataan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholders kepariwisataan, dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penguasaan terhadap isu-isu kepariwisataan, baik secara internal maupun eksternal, perlu dibentuk oleh suatu kelompok analis kebijakan kepariwisataan yang memiliki latar belakang kepariwisataan secara interdisipliner. Hal itu dilakukan agar mampu melahirkan berbagai gagasan yang bermanfaat dalam upaya menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun sistem kepariwisataan yang efisien, bermutu,dan relevan dengan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang. (Suaeb, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang definisi analisis kebijakan kepariwisataan, bentuk analisis kebijakan public, model teori analisis kebijakan versi Dunn, serta penerapan kebijakan William Dunn.

Dalam penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yaitu studi pustaka.Dalam studi pustaka, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan litelatur-litelatur yang terkait dengan kebijakan versi William Dunn dalam kepariwisataan kemudian peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap litelatur-litelatur tersebut secara mendalam sehingga dapat menghasilkan inti dalam pembahasan maupun hasil kesimpulannya tersebut. Penelitian ini menggunakan buku-buku serta literature-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Maka jenis penelitain yang digunakan ialah penelitain kualitatif. Dimana hasilnya berupa catatan serta data deskriptif yang berada pada teks yang diteliti. Dikarenakan menggunakan penelitain kualitatif, maka



membutuhkan analisis deskriptif agar memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis maupun kritis mengenai kebijakan versi William Dunn.

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000). Kebijakan publik adalah *“a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made goverenmental bodies and official. Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. (Dunn, 2004)*

Analisis kebijakan ialah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. (Duncan MacRae, 1976). Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan. (Diskon Silitonga, 2018). Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan ini tidak dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan kebijakan ini sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternatif, maka alternatif kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional.

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Wibawa dkk, 2003). Selain itu, masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya. (Syifa, dkk, 2021).

Kebijakan, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dalam dunia kepariwisataan, kebijakan kepariwisataan menjadi kata kunci dalam merumuskan tujuan umum dan spesifik wisata, maka kebijakan kepariwisataan harus benar-benar orientasinya kepada persoalan yang dihadapi oleh



kepariwisataan itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal yang disertai dengan upaya pembenahan, sehingga kualitas pelayanan kepariwisataan dapat diwujudkan. (Muhtar, 2009).

Kebijakan kepariwisataan juga merupakan salah satu kebijakan negara, memberikan pengertian kebijakan kepariwisataan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan kepariwisataan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan kepariwisataan yaitu cara untuk mendapatkan informasi kepariwisataan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis serta dalam rangka memecahkan masalah kepariwisataan tersebut.



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah adanya pengembangan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama 5 tahun kurang memberi manfaat pada masyarakat lokal di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Walaupun kurang memberi manfaat, akan tetapi masih terdapat beberapa manfaat dari adanya pengembangan Kepariwisatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Manfaat di bidang sosial, potensi kesenian semakin dilestarikan dan menjadi kekhasan lokal. Tarian sambut di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya tarian yang dimainkan saat acara-acara tertentu, kini menjadi salah satu atraksi wisata yang khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Program-program kota Wisata juga mulai dibuat seperti sedekah bumi dan festival panen raya. Pemerintah terus memberi pelatihan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dan memberi kesempatan besar bagi masyarakat untuk membuka usaha.

Terdapat lembaga masyarakat yang mengelola kota Wisata yaitu Pokdarwis (kelompok sadar wisata), adanya pokdarwis ini semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata.

Manfaat di bidang ekonomi terkait dengan potensi lokal, mata pencaharian, dan peluang usaha. Setelah ditetapkannya kota Wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pengembangan atraksi wisata terus bertambah dan semakin menarik, potensi lokal yang awalnya tidak dimanfaatkan kini dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal, potensi wisata yang ada juga sudah dibuat menjadi sebuah paket wisata, dan adanya bantuan pemerintah berupa promosi wisata.

Dari segi mata pencaharian banyak masyarakat yang beralih pekerjaan seperti membuka usaha yang berhubungan dengan wisata. Peluang usaha bagi masyarakat juga semakin tinggi setelah ditetapkannya kota Wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Manfaat di bidang lingkungan terkait dengan fasilitas, aksesibilitas dan kondisi jalan.



Fasilitas Desa Wisata semakin lengkap dan sudah diberi penanda lokasi wisata di beberapa obyek wisata, tingkat aksesibilitas juga semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah akomodasi yang dapat menjangkau kota Wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan kondisi jalan juga semakin membaik karena terus dilakukan perbaikan.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten OKU Selatan belum terkoordinasi dengan baik sehingga menghambat upaya pengembangan pariwisata sebagaimana aspek-aspek pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dilakukan melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana konsep Good Governance kurang maksimal karena antara pemerintah propinsi dengan kabupaten masih berjalan sendiri-sendiri karena kurangnya komunikasi dan koordinasi.

Pengembangan pariwisata sejalan dengan perencanaan suatu wilayah yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan terhadap suatu daerah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditetapkan menjadi wisata bahari kurang menyesuaikan dengan realitas demografi karena sebagian masyarakat bekerja sebagai petani bukan nelayan sehingga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan memiliki dua tugas sekaligus.

Pertama adalah pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi laut namun juga memberdayakan masyarakat petani untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata melalui potensi pertanian yang dimiliki.

Identifikasi dalam partisipasi pengembangan pariwisata sebagaimana konsep pemberdayaan masyarakat melalui hasil penelitian juga sangat terbantu melalui pihak pengusaha pariwisata.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan para pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui program casual.

Untuk ke depannya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat memerlukan keterlibatan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pengembangan suatu wilayah. Penelitian tentang pengembangan pariwisata melalui pendekatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan



4.2 Rekomendasi

Terdapat 3 pemangku kepentingan yang paling berpengaruh dalam pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu pemerintah, kelompok sadar wisata (pengelola), dan masyarakat lokal.

a. Pemerintah

Pemerintah Kota Madya Palembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus tetap memantau jalannya aktivitas pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sehingga, eksistensi kota Wisata dapat terus berlanjut.

- Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan masih rendah (Dodds dan Butler 2009)
- Meningkatkan kurangnya pendana
Pendanaan yang memadai untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan masih kurang (Dodds dan Butler 2009)
- Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan masih kurang (Dodds dan Butler 2009)
- Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas
Industri pariwisata sering kesulitan mencari karyawan yang berkualitas dan terampil (Jogya Tourism Training Center [Http//jtcc.co.id](http://jtcc.co.id)).
- Meningkatkan kurangnya infrastruktur
Infrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata seperti jalan, hotel, bandara dan pelabuhan/ dermaga masih kurang. (e journal BSI. <https://ejournal.bsi.qc.id>)
- Meningkatkan kurang investasi
Investasi disektor pariwisata di Indonesia masih kurang (e journal BSI. <https://ejournal.bsi.qc.id>)



- Meningkatkan kurangnya Publikasi
Publikasi untuk wilayah masih kurang (e journal
BSI. <https://ejournal.bsi.qc.id>)
- Meningkatkan penyelesaian peraturan yang tumpang tindih
Peraturan yang tumpang tindih menjadi kendala dalam pengembangan
pariwisata (e journal BSI. <https://ejournal.bsi.qc.id>)
- Meningkatkan kurangnya perhatian pada lingkungan hidup
Aspek lingkungan hidup dalam pengembangan pariwisata masih kurang di
perhatikan (e journal BSI. <https://ejournal.bsi.qc.id>).

b. Kelompok Sadar Wisata (Pengelola)

- Pihak pengelola kota Wisata harus terus melakukan promosi dengan berbagai media, seperti terus mengaktifkan blog dan media sosial lainnya.
- Menjalin hubungan dengan komunitas wisata di daerah lain khususnya kota Wisata di wilayah lain.
- Pihak pengelola harus lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan wisata.
- Pihak pengelola sebaiknya lebih terbuka terhadap masyarakat tentang bagaimana rencana dan hal apa saja yang sedang dilakukan dalam pengembangan kota wisata.
- Pihak pengelola dapat mengajarkan kepada masyarakat lokal untuk menjadi pemandu wisata, sehingga tidak lagi kekurangan tenaga yang memandu wisatawan yang berkunjung.
- Pihak pengelola dapat mengikut sertakan pemilik produk wisata dalam setiap acara perkumpulan kelompok sadar wisata agar mereka dapat mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyambut wisatawan yang datang.

c. Masyarakat

- Masyarakat harus lebih aktif ikut serta dalam setiap kegiatan wisata yang diselenggarakan.

- Masyarakat sebaiknya memiliki kepercayaan terhadap pengelola bahwa pengembangan yang dilakukan selama ini hasilnya juga untuk masyarakat lokal.
- Masyarakat sebaiknya mau untuk lebih belajar melestarikan budaya sapta pesona sebagai bentuk dari kota wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan), sehingga tercipta suasana khas kota Wisata.

4.3 Kebijakan

Kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan bentuk kebijakan politik (political will) dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan pertimbangan potensi yang dimiliki.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang dilakukan secara nasional yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena memiliki banyak ikutan dalam pelaksanaannya.

Hal ini menjadi dasar Pemerintah Propinsi dalam menetapkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi yang menjalankan pembangunan yang berbasis pada pariwisata.

Evaluasi yang dilakukan dalam penetapan kebijakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjalankan pembangunan yang berbasis pariwisata yaitu:

1. Kebijakan yang dilakukan tidak sepenuhnya memperhatikan aspek internal dan aspek eksternal yang ada pada demografi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kebijakan pengembangan pariwisata yang dimaksud merupakan bagian dari demografi yang harus memperhatikan potensi alam dan potensi budaya dalam arti yang luas. (Nurhadi, 2014). Selain dari faktor demografi, maka faktor lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian adalah faktor teknologi informasi yang saat ini telah menjadi keniscayaan atau sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Teknologi informasi yang memasuki seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dan seluruh sektor pembangunan yang diselenggarakan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan era revolusi industri.

- 2). Diperlukan kebijakan yang memberikan keterjangkauan masyarakat luas sehingga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isu pengusaha profesional dalam menguasai kunjungan wisata memerlukan dukungan dari pihak pemerintah untuk mendukung pengusaha tradisional agar mendapatkan percepatan dalam proses pengembangan pariwisata secara keseluruhan.

Sektor pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di kelola secara inovatif, hal ini di dukung dengan ada program kota wisata yang di gagas melalui peraturan daerah No. 1 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya program tersebut di legitimasi melalui peraturan bupati tentang destinasi wisata. Tujuan dari diterapkannya program tersebut tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung berkembangnya kota wisata, memberikan peran masyarakat lokal dan membentuk kawasan kota menjadi kota wisata, meningkatkan potensi kota wisata sebagai upaya tersedianya lapangan kerja dan optimalisasi kualitas ekonomi mandiri masyarakat setempat, menstimulus kesadaran masyarakat pentingnya mengelola potensi kota wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola kota wisata membentuk kelompok masyarakat sadar wisata atau di singkat dengan **Pokdarwis**.

Pembentukan kelompok masyarakat tersebut didasarkan pada alasan substansif yaitu memberikan peran ke pada masyarakat setempat untuk berkolaborasi dalam mengelola, mengawasi, berinovasi serta menjaga lingkungan kawasan kota wisata yang telah dicanangkan oleh pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan.

Pokdarwis terdapat di setiap kawasan desa wisata dengan susunan pengurus: penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

Memahami kelebihan dari program Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang relevansinya serupa dengan fakta empiris yang ada dengan mempertimbangkan karakteristik fokus nilai dan dualitas nilai (William Dunn 1999) menjelaskan bahwa karakteristik fokus nilai adalah upaya untuk menentukan manfaat sosial dari kebijakan dan program, sedangkan dualitas nilai berfokus pada tuntutan evaluasi multifungsi yang di pandang sebagai tujuan dan cara yang merefleksikan kepentingan objektif dari inplikasi tujuan dan sasaran.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan peraturan No.32 Tahun 2004 tentang destinasi wisata menjadi kota wisata telah terdapat tujuan serta sasaran yang telah di targetkan oleh pemerintah kabupaten Ogan Lomering Ulu Selatan, sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran program kota wisata kabupaten ogan komering ulu selatan.

1. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah yang diukur dari sasaran: jumlah kegiatan festival kebudayaan dan kesenian, kajian kesenian, fasilitator kesenian, pagelaran kesenian, pengembangan sumber daya manusia di bidang kesenian, tempat dan organisasi kesenian daerah.
2. Meningkatkan rasio kunjungan wisatawan sesuai dengan indikator sasaran : peningkatan kunjungan wisata, pelayanan publik, industrilisasi pariwisata, pelaku usaha pariwisata.
3. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah sasarannya adalah ; peningkatan jumlah wisatawan domestik dan luar negeri, meningkatkan kerjasama masyarakat dalam sektor pemberdayaan pengusaha pariwisata.

Selanjutnya dengan menganalisa hasil penelitian ini dengan tiori evaluasi kebijakan publik karya (William Dunn 1999) pada kacian dualitas nilai dan interdependensi fakta dan nilai telah ditemukan fakta empiris atas kinerja kebijakan yang optimal yang relevanisnya sebagai berikut :

Pembentukan kelompok sadar wisata (**Pokdarwis**) merupakan realisasi dari peraturan daerah No.1 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2015-2019 yang memberikan amat ke pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk membentuk dan membina (**Pokdarwis**) diseluruh desa wisata binaan.

Kelompok sadar pariwisata ini merupakan hasil dari inovasi kebijakan yang di prakasai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mengembangkan sektor pariwisata dikawasan pedesaan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Tujuannya adalah agar setiap masyarakat dapat mengembangkan berinovasi dalam mengelola kawasan pedesaan untuk dijadikan desa wisata yang tidak hanya dapat menunjang



serta menopang peningkatan kualitas perekonomian lokal namun juga kearifan lokal yang ada di desa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu sebagai penanggungjawab atau leading sector dari seluruh program kerja Pokdarwis sebagai wakil dari inplementor program kota wisata. Selain itu yang mendukung teralisasinya program tersebut adalah adanya pantai, air terjun, perbukitan atau dataran tinggi sampai pada keunikan seni budaya yang melekat pada masyarakat Kab Ogan Komering Ulu Selatan, seperti kampung adat serta upacara adat.

Pedoman penelitian dari analisa evaluasi kebijakan publik karya (William Dunn 1999) pada kajian orientasi kebijakan masa lampau dan masa kini telah di dapatkan kekurangan yang menjadi bagian dari program kota wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi maupun reverensi dari emplementasi program kota wisata di Kabupaten Ogan Komering Selatan sangat kurang bahkan tidak ada.

Hal ini yang mendasari tidak diketahuinya apakah program tersebut dapat berjalan dengan efektif, efesien, tepat sasaran dan tepat guna mengingat setiap kebijakan dan program harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait yang mampu mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga ditemukan tidak adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki kompentensi di bidang pariwisata dan hal ini akan mengakibatkan prematurnya keputusan yang di ambil dan tidak ada fungsi pengawasan dari pihak external untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan menyeimbangkan peran dari kinerja yang dilaksanakan oleh kelompok sadar pariwisata (Pokdarwis) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Sakip 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Herman (2017) Kesiapan destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan
Bridgman dan Davis (Suharto, 2013:3) Kebijakan Publik
Bridgeman dan Davis (Suharto, 2007:5) Kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan
Richard Rose (Winarno, 2014:20) Kebijakan public
William N. Dunn (2003:109) Kebijakan publik
Dye (Suharto, 2013:44) kebijakan publik secara luas
(Wahab, 2003.5) Tiori Pariwisata
(Wahab, 2003.9) Daya Tarik Pariwisata
(Wahab, 2003.40) Bisnis, keluarga, misi, rapat dinas
(Susanto, 1995: 134) Konsep Kepariwisata
(William Dunn 1999) Kebijakan
(William Dunn 1999) Tiori evaluasi kebijakan publik
(Dunn 2004) Kebijakan (Policy)
(Hasnadi.2019) Pembangunan Sistem Kepariwisata
(Aslamiah dkk.2014) Akuntabilitas dan pencitraan publik
(Suaeb, 2021) Sistem Kepariwisata secara internal
(William N.Dun,2000) Masalah masalah Kebijakan
(Dunn, 2004) Kebijakan Publik
(Duncan Mac Rae) Analisis Kebijakan
(Diskon Silitonga, 2018) Analisis Kebijakan
(Wibawa dkk, 2003) Kebijakan suatu yang membuat prinsip-prinsip
(Syifa dkk,2021) Kebijakan
(Muhtar, 2009) Kebijakan
(Dodds dan Butler, 2009) Pendidikan masyarakat tentang Pariwisata berkelanjutan masih rendah
(Dodds dan Butler, 2009) Pendanaan yang memadai untuk mengembangkan pariwisata
(Dodds dan Butler, 2009) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan masih kurang
(Jogya Tourism Training Center [Http://jttc.co.id](http://jttc.co.id)).Industri pariwisata sering kesulitan mencari karyawan yang kwalltas dan terampil
(e journal BSI.<https://ejournal.bsi.qc.id>) Investasi disektor pariwisata di Indonesia masih kurang.
(e journal BSI.<https://ejournal.bsi.qc.id>) Infrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata seperti jalan, hotel, bandara dan pelabuhan/ dermaga masih kurang.
(e journal BSI.<https://ejournal.bsi.qc.id>) Publikasi untuk wilayah masih kurang.
(e journal BSI.<https://ejournal.bsi.qc.id>) Peraturan yang tumpang tindih menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata.
(e journal BSI.<https://ejournal.bsi.qc.id>).Aspek lingkungan hidup dalam pengembangan pariwisata masih kurang.
(Nurhadi, 2014).Tiori Kebijakan
(William Dunn 1999) implikasi tujuan dan sasaran
(William Dunn 1999) tiori evaluasi kebijakan publik
(William Dunn 1999) Evaluasi Kebijakan Publik

